

PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, DAN PENGALAMAN PEMERIKSA TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN

Rivandi Bagas Bimantara

bags.tara007@gmail.com

Sutjipto Ngumar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research has two purposes, first to know the influence of independent variable (independence, objectivity, and experience of examiner) to the dependent variable (fraud detection), second to know which independent variable has the most dominant influence to the dependent variable. In the State Audit Standards (SPKN) in paragraph 21 states that the Examiner should identify fraud risk factors and assess the risk of non-compliance with the provisions of laws and regulations caused by fraud and / or non-compliance (abuse). BPK plays a role in preventing fraud, fraud, waste, abuse, and mismanagement in the management and accountability of state finances. The research type used is quantitative method. Sampling method using Convenience Sampling. The model of analysis in this research is multiple linear regression. The results of this research shows that the independence, objectivity, and experience of the examiner have a positive and significant influence on the detection of fraud, meaning that the higher level of independence, objectivity, and experience of the examiner may result in the higher sensitivity of the auditor in the investigation of a fraud. Based on the results of multiple linear regression test can be found that the most dominant variable is objectivity.

Keywords: Independence, objectivity, experience, fraud detection

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama untuk mengetahui pengaruh variabel independen (independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa) terhadap variabel dependen (pendeteksian kecurangan), kedua untuk mengetahui variabel independen mana yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel dependen. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan/atau ketidakpatutan (*abuse*). BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif. Metode pengambilan sampling menggunakan *Convenience Sampling*. Model analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, artinya bahwa semakin tinggi tingkat independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa dapat mengakibatkan semakin tingginya kepekaan pemeriksa dalam mentedeksi sebuah kecurangan. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat ditemukan bahwa variabel yang paling dominan adalah objektivitas.

Kata Kunci: Independensi, Objektivitas, Pengalaman, Pendeteksian Kecurangan.

PENDAHULUAN

Di jaman yang menuntut kejelasan suatu informasi seperti saat ini, laporan keuangan memegang peranan sangat penting untuk bisa melihat kinerja suatu perusahaan atau instansi. Dan dari jaman ke jaman laporan keuangan yang disajikan pun semakin kompleks dikarenakan adanya kegiatan perputaran finansial yang terjadi terus menerus. Sebab karena itulah, profesi akuntan menjadi suatu profesi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Audit yang dilakukan oleh para akuntan akan menghasilkan suatu opini audit apakah perusahaan telah melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga laporan keuangan dapat lebih dipercaya oleh para pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Menurut Kohler (1972) dan Mautz (1961) dalam Kayo (2013: 35) audit adalah pemeriksaan tentang kebenaran data akuntansi untuk dapat menentukan ketelitian dan dapat diandalkannya (dipercayanya) laporan keuangan yang disajikan oleh peneliti. Menurut Konrath (2002: 5) dalam Agoes (2014: 2), audit itu sendiri merupakan suatu proses yang berurutan dan runtut untuk secara objektif mendapatkan dan memberikan penilaian tentang bukti yang mengenai asersi tentang aktivitas-aktivitas dan kejadian-kejadian ekonomi untuk dapat meyakinkan tingkat keterikatan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mempublikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemeriksaan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan di sektor privat dan sektor publik. Pemeriksaan sektor privat merupakan sebuah unit dalam perusahaan yang melakukan fungsi audit terhadap kinerja perusahaan, sedangkan pemeriksaan sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada entitas yang melaksanakan pelayanan dan pengadaan barang yang sumber pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara. Pemeriksaan di sector privat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sedangkan pemeriksaan di sektor pemerintahan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perbandingan pemeriksaan di sektor privat dan sektor publik dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Perbedaan Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Sektor Privat dan Sektor Publik

Jenis	Sektor Privat	Sektor Publik
Institusi Pemeriksa	KAP	BPK RI
Istilah orang yang memeriksa	Auditor	Pemeriksa
Standar Pemeriksaan	Standar Profesional Akuntan Publik	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standar Laporan Keuangan yang diperiksa	Standar Akuntansi Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan
Objek pemeriksaan (<i>auditee</i>)	Perusahaan atau Entitas Swasta	Entitas, program, kegiatan dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (2017)

Halim dan Kusufi (2012: 384) menerangkan bahwa BPK RI sebagai badan audit eksternal pemerintah telah diatur oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 huruf e angka (1) yang berbunyi "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Dan BPK RI adalah salah satu anggota dari INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), yaitu organisasi yang menaungi lembaga-lembaga audit eksternal pemerintah diseluruh dunia (Tuanakotta, 2016: 630).

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK memiliki nilai-nilai dasar sebagai kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh pemeriksa, yaitu independen, integritas dan profesionalisme. Nilai-nilai dasar ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK RI Tahun 2016-2020 dan Peraturan BPK nomor 2 tahun 2011 tentang Kode Etik BPK yang ditetapkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada Standar Umum (paragraf : 7) yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar BPK.

Dalam BPK RI, orang yang melakukan pemeriksaan keuangan suatu instansi disebut pemeriksa. Pemeriksa BPK pada saat melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, mereka diberikan kepercayaan penuh dari para pemakai laporan keuangan yang diaudit apakah laporan keuangan telah disajikan dengan baik dan wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mengetahui apakah pemeriksa BPK telah menjalankan tugasnya sesuai yang diharapkan sangat tergantung kepada bagaimana para pemeriksa saat melakukan proses audit serta kemampuan dan kualitas pemeriksa itu sendiri. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar yang diterapkan oleh BPK, maka pemeriksa BPK harus memiliki prinsip-prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan.

Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Dalam Standar Umum SPKN pada paragraf A.2 menyatakan bahwa integritas antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Objektivitas sebagai salah satu faktor dari prinsip integritas, harus dipegang teguh oleh pemeriksa. Profesionalisme dalam Standar Umum SPKN pada paragraf 5 huruf (j) merupakan hal yang berkaitan dengan sebuah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pada paragraf 13 menyebutkan bahwa Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, dimana kompetensi profesional mencakup pendidikan dan Pengalaman.

Berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016-2020 yang didalamnya lebih menekankan pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka lebih menguatkan lagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan dalam Standar Umum SPKN pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (fraud) dan/atau ketidakpatutan (abuse).

Dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemeriksa, yaitu independensi, objektivitas yang merupakan faktor dari integritas, dan pengalaman yang merupakan faktor dari kompetensi profesional, muncul sebuah pendapat bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi pemeriksa dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan dalam suatu laporan keuangan.

Namun pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya karena belum adanya penelitian lebih lanjut untuk membuktikan sejauh mana pengaruh ketiga variabel ini dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan dalam suatu laporan keuangan. Dari ketiga faktor yang disebutkan pada latar belakang diatas, penelitian ini hendak menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan atau dalam hal ini variabel independen diantaranya independensi pemeriksa, objektivitas pemeriksa, dan pengalaman pemeriksa. Penelitian ini menambahkan variabel objektivitas sebagai variabel independen serta penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini untuk menguji apakah independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa terhadap pendeteksian kecurangan.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) adalah teori yang menerangkan tentang adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang berhak mengetahui informasi apapun yang dibutuhkannya. Sedangkan agen adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal. Dengan kondisi seperti itu maka pihak agen berusaha untuk mampu memberikan kinerja yang terbaik kepada pihak prinsipal (Fahmi, 2013: 66).

Prinsipal biasanya ingin mengetahui informasi tentang aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (Rahayu, 2016: 3). Tetapi tujuan dari pihak agen dan pihak prinsipal bisa jadi tidak sejalan. Karena perbedaan tujuan inilah yang menyebabkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Namun hal ini dapat dikurangi jika kedua belah pihak memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, maka dari itu agen tidak selalu bertindak dalam kepentingan terbaik prinsipal (Messier et al., 2014: 6).

Dalam hal ini kedudukan pemerintah adalah sebagai agen dari rakyat, sedangkan rakyatnya sebagai prinsipalnya. Sebagai agen, pemerintah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD. Dalam pola agen-prinsipal tersebut, terdapat ketidakseimbangan kepemilikan informasi. Prinsipal (DPR/DPRD) tidak mempunyai berita atau pengetahuan secara menyeluruh tentang apakah laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dari pihak agen (pemerintah) telah mencerminkan kondisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai, dan pengungkapan secara lengkap. Oleh karena itu diperlukan pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut dimana lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Mursyidi, 2009:17-18).

Kecurangan

Pada dasarnya, kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang tidak bisa dianggap remeh dalam hal audit laporan keuangan. Pengertian kecurangan itu sendiri sangat luas dan terletak pada beberapa kategori kecurangan yang dilakukan. Jusup (2014: 410) menerangkan bahwa kecurangan dalam hal proses audit laporan keuangan adalah suatu bentuk kesengajaan dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi. Oleh

karena itu audit merupakan suatu rangkaian proses dalam menemukan indikasi kecurangan. Arens et al. (2015: 170) yang mengutip tentang standar audit yang telah ditetapkan oleh *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, menyatakan bahwa tujuan audit adalah sebagai penyedia untuk pemakai laporan keuangan (untuk mengetahui) suatu pendapat (yang) diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.

Tuanakotta (2014: 122) mengutip dari *International Standards of Auditing (ISA) 200* tentang *Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing*, menyatakan bahwa auditor wajib memenuhi semua ISA yang relevan dengan audit. Suatu ISA adalah relevan dengan audit jika ISA sudah berlaku dan situasi yang ditangani ISA (memang) ada. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan audit telah memiliki standar yang dibuat untuk dipatuhi agar laporan yang dihasilkan wajar dan terbebas dari indikasi kecurangan yang ada.

Standar Umum SPKN pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan/atau ketidakpatutan (*abuse*). *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Nasution dan Fitriany (2012: 6-7) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok: 1) korupsi (*Corruption*); 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*); 3) Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*).

Independensi

Independensi adalah berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002: 26-27 dalam Pangestika *et al.*, 2014).

Independensi menurut Standar Umum SPKN merupakan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Menurut kode etik akuntan profesional pada definisi, independensi pemikiran merupakan kondisi mental yang memungkinkan untuk menyatakan kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seseorang dapat bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor Akuntan atau anggota tim audit telah berkurang.

Sikap independensi juga diperlukan oleh auditor agar ia bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga kecurangan yang ada pada perusahaan yang diauditnya dapat dideteksi dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut telah terdeteksi, auditor tidak ikut mengamankan praktik kecurangan tersebut (Lastanti, 2005 dalam Widiyastuti dan Pamudji, 2009).

Objektivitas

Objektivitas adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksa dalam mendeteksi adanya kecurangan. Objektivitas sebagai salah satu faktor dari prinsip integritas, harus dipegang teguh oleh pemeriksa. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Dalam Standar Umum SPKN pada paragraf A.2 menyatakan bahwa integritas antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Dalam Kode Etik Akuntan Profesional Seksi 120, pada 120.1 menyatakan bahwa prinsip objektivitas mewajibkan semua Akuntan Profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak sepatutnya dari pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Dengan kata lain, seorang auditor harus adil dalam tindakannya dan tidak boleh terpengaruh dengan apapun yang berkaitan tentang pekerjaannya.

Menurut Jusup (2014: 111) prinsip objektivitas mewajibkan para praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau mendapatkan pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Sukriah dan Inapty (2009: 7), menyatakan obyektivitas sebagai terlepasnya seseorang dari seluruh pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat mendorong obyektivitas antara lain 1) dapat diandalkan dan dipercaya; 2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa; 3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain; 4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi; serta 5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

Pengalaman Pemeriksa

Pengalaman dapat menjadi modal pemeriksa dalam pendeteksian kecurangan. Pengalaman merupakan salah satu faktor dari profesionalisme yang termuat didalam nilai-nilai dasar BPK. Profesionalisme dalam Standar Umum SPKN pada paragraf 5 huruf (j) merupakan hal yang berkaitan dengan sebuah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dalam Standar Umum SPKN pada paragraf 8 menyatakan bahwa Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. Sedangkan pada paragraf 13 menyebutkan bahwa Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, dimana kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana seseorang yang menggeluti satu bidang dalam rentang waktu yang lama dan telah menghadapi berbagai masalah yang ada sehingga dapat mengetahui pemecahan masalah yang ada menurut masalah yang sering dihadapinya. Secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan berapa lama waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan yang digelutinya (Marinus et al.1997 dalam Samsi, 2012: 4).

Boner dan Walker (1994) dalam Hasanah (2010) menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang timbul dari penambahan pelatihan formal sama bagusnya dengan pengalaman khusus yang didapat untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional.

Pelatihan dalam konteks ini dapat berupa seminar, simposium, dan kegiatan-kegiatan penunjang kompetensi lainnya. Selain program-program pelatihan, para profesional juga mengalami proses sosialisasi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi yang dihadapi, sehingga pengetahuan profesional akuntan berkaitan dengan kekeliruan kemungkinan akan berkembang dengan adanya program pelatihan maupun pengalaman yang dimiliki.

Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan harus menajalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kerja keras. Namun pemeriksa juga harus melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPK. Menurut Standar Umum SPKN paragraf 15 menyatakan bahwa pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 (delapan puluh) jam dalam 2 (dua) tahun. Pengalaman pemeriksa dalam melakukan kegiatan pemeriksaan bisa menjadi sebuah faktor yang dapat meningkatkan nilai dasar profesionalisme BPK sebab semakin lama pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan maka pemeriksa akan meningkatkan tingkat kepekaan terhadap informasi yang relevan. Pengalaman pemeriksa juga didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang diikuti agar dapat meningkatkan kompetensi pemeriksa dalam melakukan kegiatan pemeriksaan.

Semakin tingginya pengalaman dari seorang auditor maka akan semakin tinggi pula pendeteksian kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa dengan pengalaman yang lama akan meningkatkan keahlian auditor dalam pendeteksian kecurangan (Aulia, 2013). Pernyataan ini dibuktikan oleh Nasution dan Fitriany (2012) yang menyatakan bahwa pengalaman audit mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan mendeteksi kecurangan.

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang dihasilkan oleh peneliti terhadap rumusan masalah yang dimana rumusan masalah dinyatakan kedalam bentuk pernyataan yang tertulis jelas.

H₁: Independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

H₂: Objektivitas berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

H₃: Pengalaman Pemeriksa berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur. Metode pengambilan sampling menggunakan Convenience Sampling. Dari 150 orang pemeriksa didapatkan sampel sejumlah 59 pemeriksa yang bekerja pada BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Independensi

Definisi independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Indikator dari variabel independensi adalah: 1) independensi penyusunan program; 2) independensi pelaksanaan pekerjaan; 3) independensi pelaporan.

Objektivitas

Definisi objektivitas adalah terlepasnya seseorang dari seluruh pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Indikator dari variabel objektivitas adalah: 1) bebas dari benturan kepentingan; 2) pengungkapan kondisi sesuai fakta.

Pengalaman Pemeriksa

Definisi pengalaman pemeriksa adalah waktu yang telah dijalani oleh auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Indikator dari variabel pengalaman pemeriksa ini adalah: 1) Lama bekerja sebagai pemeriksa; 2) banyaknya tugas pemeriksaan.

Variabel Dependen

Pendeteksian Kecurangan

Pendeteksian kecurangan dalam hal proses audit laporan keuangan adalah suatu bentuk kesengajaan dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi (Jusup, 2014: 410).

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda , dengan melihat pengaruh dari variabel independen yaitu independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa terhadap variabel dependen yaitu pendeteksian kecurangan. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PK = \alpha + \beta I + \beta O + \beta PP + \varepsilon$$

Keterangan :

PK	= Pendeteksian Kecurangan
I	= Independensi
O	= Objektivitas
PP	= Pengalaman Pemeriksa
β	= Koefisien Regresi
ε	= Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Menurut Ghazali (2011:53) pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika korelasi antara tiap variabel dengan total variabel secara keseluruhan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,01 atau 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Butir Kuesioner

Variabel	Item	Signifikansi	Keterangan
Independensi	Independensi 1	.000	Valid
	Independensi 2	.000	Valid
	Independensi 3	.000	Valid
	Independensi 4	.000	Valid
	Independensi 5	.000	Valid
	Independensi 6	.000	Valid
	Independensi 7	.000	Valid
	Independensi 8	.010	Valid
	Independensi 9	.000	Valid
Objektivitas	Objektivitas 1	.000	Valid
	Objektivitas 2	.000	Valid
	Objektivitas 3	.000	Valid
	Objektivitas 4	.000	Valid
	Objektivitas 5	.000	Valid
	Objektivitas 6	.000	Valid
	Objektivitas 7	.000	Valid
	Objektivitas 8	.000	Valid
P_Pemeriksa	P_Pemeriksa 1	.000	Valid
	P_Pemeriksa 2	.000	Valid
	P_Pemeriksa 3	.000	Valid
	P_Pemeriksa 4	.000	Valid
	P_Pemeriksa 5	.000	Valid
	P_Pemeriksa 6	.000	Valid
	P_Pemeriksa 7	.000	Valid
	P_Pemeriksa 8	.000	Valid
	P_Pemeriksa 9	.000	Valid
Pend_Kecurangan	Pen_Kecurangan 1	.001	Valid
	Pen_Kecurangan 2	.003	Valid
	Pen_Kecurangan 3	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 4	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 5	.006	Valid
	Pen_Kecurangan 6	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 7	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 8	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 9	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 10	.000	Valid
	Pen_Kecurangan 11	.000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Uji Reliabilitas

Untuk menganalisis reliabilitas, pengukuran dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan

dengan menggunakan SPSS yaitu uji *Cronbach Alpha* (α). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika menunjukkan nilai cronbach alpha di atas 0,6.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Independensi	.725	Reliabel
Objektivitas	.895	Reliabel
Pengalaman Pemeriksa	.873	Reliabel
Pendeteksian Kecurangan	.793	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode *Kolmogorov Sminov*. Penerapan pada uji *Kolmogorov Sminov* adalah bahwa jika signifikansi $< 0,05$ artinya data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Tetapi jika signifikansi $> 0,05$ maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku artinya data yang kita uji normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std Deviation	2.09407067
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.870
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data Primer Diolah

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak (Ghozali, 2011:104).

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

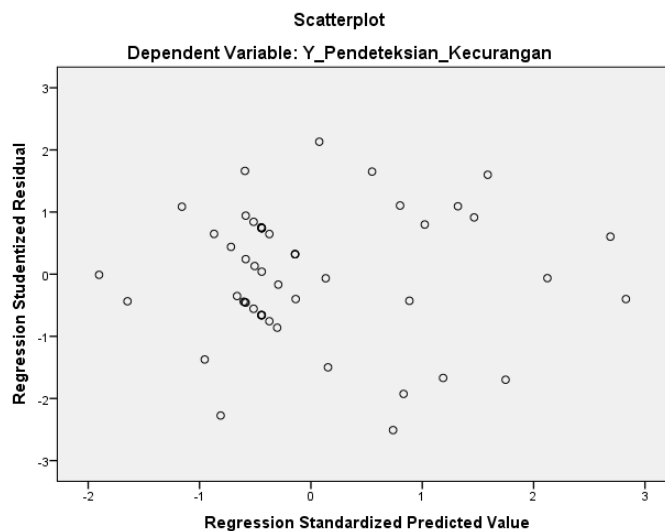
Model		Colinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	Independensi	.725	1.379
	Objektivitas	.515	1.941
	Peng. Pemeriksa	.662	1.510

Sumber: Data Primer Diolah

Menurut hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* telah melebihi 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Sumber: Data Primer Diolah

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *scatterplot* memperlihatkan bahawa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena pola tidak jelas penyebarannya, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dipergunakan untuk meguji model regresi linier apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t-1 (periode sebelumnya) (Ghozali, 2011:110).

Tabel 6
Hasil Uji Autokolerasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.819	.671	.650	1.44769	1.945

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa angka *durbin-watson* sebesar 1,945. Jika melihat tabel *durbin-watson*, nilai DU menunjukkan angka 1,6875 dan nilai DL menunjukkan angka 1,475. Karena $DU < DW < 4-DU$ atau $1,6875 < 1,945 < 2,3125$, maka penelitian ini dapat dikatakan tidak ada autokolerasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.507	2.631		10.453	.000
	Independensi	.142	.062	.220	2.273	.028
	Objektivitas	.444	.090	.609	4.935	.000
	Peng. Pemeriksa	.287	.086	.373	3.324	.002

Sumber: Data Primer Diolah

Pada analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan regresi linier berganda :

$$PK = 27,507 + 0,142 I + 0,444 O + 0,287 PP + \varepsilon$$

Yang memiliki makna jika nilai seluruh variabel dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka variabel pendeteksian kecurangan akan konstan sebesar 27,507.

Selanjutnya, jika terjadi peningkatan pada independensi sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pendeteksian kecurangan sebesar 0,142 satuan dengan asumsi seluruh variabel lainnya konstan atau sama dengan nol (0).

Selanjutnya, jika terjadi peningkatan pada objektivitas sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pendeteksian kecurangan sebesar 0,444 satuan dengan asumsi seluruh variabel lainnya konstan atau sama dengan nol (0).

Selanjutnya, jika terjadi peningkatan pada pengalaman pemeriksa sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pendeteksian kecurangan sebesar 0,287 satuan dengan asumsi seluruh variabel lainnya konstan atau sama dengan nol (0).

Uji F

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Kuncoro 2011:106). Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh bersama-sama antar variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	3	57.365	13.989	.000
	Residual	55	4.101		
	Total	58			

Sumber: Data Primer Diolah

Menurut hasil uji F yang ditampilkan menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan adalah layak dan terdapat pengaruh bersama-sama antar variabel independen dan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.819	.671	.650	1.44769	1.945

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa hasil R Square sebesar 0,671 yang berarti jika variabel independen dalam penelitian ini (independensi, objektivitas, dan pengalaman pemeriksa) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pendeteksian kecurangan sebesar 67,1% dan sisanya 32,9% dapat dijelaskan menggunakan variabel lain.

Uji Hipotesis

Uji t dapat digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka hipotesis alternatif diterima,

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis
Coefficients

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.507	2.631		10.453	.000
	Independensi	.142	.062	.220	2.273	.028
	Objektivitas	.444	.090	.609	4.935	.000
	Peng. Pemeriksa	.287	.086	.373	3.324	.002

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa diketahui bahwa nilai signifikansi dari independensi adalah 0,028. Karena nilai signifikansi dari independensi menunjukkan nilai dibawah 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Selanjutnya, diketahui bahwa nilai signifikansi dari objektivitas adalah 0,000. Karena nilai signifikansi dari independensi menunjukkan nilai dibawah 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa objektivitas berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Selanjutnya, diketahui bahwa nilai signifikansi dari pengalaman pemeriksa adalah 0,002. Karena nilai signifikansi dari independensi menunjukkan nilai dibawah 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa pengalaman pemeriksa berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Pembahasan

Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan

Independensi menurut Standar Umum SPKN merupakan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Independensi merupakan salah satu nilai dasar yang dijunjung tinggi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu di dalam instansi BPK. Sikap independensi ini adalah salah satu faktor yang sangat penting yang harus dipegang oleh pemeriksa dalam melakukan pekerjaannya untuk dapat mendeteksi adanya indikasi sebuah kecurangan atau tidak dalam laporan keuangan. Dari hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa tingkat independensi dapat mempengaruhi pemeriksa dalam pendeteksian kecurangan. Hal ini sependapat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Aulia (2013) dan Pangestika *et al.* (2014).

Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan akan selalu memegang teguh independensi. Pemeriksa yang memegang teguh independensi akan selalu melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain pemeriksa tidak akan pernah terpengaruh dengan pihak-pihak lain dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana semakin tinggi nilai independensi yang dipegang oleh pemeriksa, maka semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan.

Pengaruh Objektivitas terhadap Pendeteksian Kecurangan

Menurut Jusup (2014: 111) prinsip objektivitas mewajibkan para praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau mendapatkan pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Objektivitas adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksa dalam mendeteksi adanya kecurangan. Objektivitas sebagai salah satu faktor dari prinsip integritas, harus dipegang teguh oleh pemeriksa. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Dalam Standar Umum SPKN pada paragraf A.2 menyatakan bahwa integritas antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa objektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini sependapat dengan penelitian dari Gita (2013) dan Sukriah dan Inapty (2009).

Pemeriksa harus selalu bersikap objektif dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak boleh terpengaruh pandangan pihak-pihak lain yang subjektif, sehingga pemeriksa dapat mengemukakan hasil penelitian apa adanya. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana jika nilai objektivitas pemeriksa semakin tinggi maka diikuti dengan kenaikan tingkat pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang diperiksa.

Pengaruh Pengalaman Pemeriksa terhadap Pendeteksian Kecurangan

Pengalaman dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana seseorang yang menggeluti satu bidang dalam rentang waktu yang lama dan telah menghadapi berbagai masalah yang ada sehingga dapat mengetahui pemecahan masalah yang ada menurut masalah yang sering dihadapinya. Secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan berapa lama waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan yang digelutinya (Marinus et al.1997 dalam Samsi, 2012: 4). Pada Standar Umum SPKN paragraf 13 menyebutkan bahwa Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, dimana kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Dari hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa pengalaman pemeriksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2013) serta Nasution dan Fitriany (2012).

Salah satu modal pemeriksa dalam pendeteksian kecurangan adalah pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu faktor dari profesionalisme yang termuat didalam nilai-nilai dasar BPK. Profesionalisme dalam Standar Umum SPKN pada paragraf 5 huruf (j) merupakan hal yang berkaitan dengan sebuah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Seorang pemeriksa yang lebih berpengalaman akan memiliki skema yang lebih baik dalam mendefinisikan keliruan-keliruan daripada pemeriksa yang kurang berpengalaman. Pengaruh yang terjadi adalah positif atau jika tingkat pengalaman pemeriksa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pada hasil uji koefisien determinasi, menunjukkan jika nilai R Square sebesar 0,671. Atau dengan kata lain, jika ketiga variabel independen dalam penelitian ini (independensi, objektivitas, dan pengalaman

pemeriksa) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pendeteksian kecurangan sebesar 67,1% dan sisanya 32,9% dapat dijelaskan menggunakan variabel lain. (2) Pada hasil uji hipotesis, independensi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat terlihat dari uji t yang memiliki nilai t hitung (2,273) yang lebih besar daripada t tabel (2,001) dan/atau nilai signifikansi yang dibawah 0,05 (0,028). Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana semakin tinggi nilai independensi yang dipegang oleh pemeriksa, maka semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan. (3) Pada hasil uji hipotesis, objektivitas, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat terlihat dari uji t yang memiliki nilai t hitung (4,935) yang lebih besar daripada t tabel (2,001) dan/atau nilai signifikansi yang dibawah 0,05 (0,00). Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana jika nilai objektivitas pemeriksa semakin tinggi maka diikuti dengan kenaikan tingkat pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang diperiksa. (4) Pada hasil uji hipotesis, pengalaman pemeriksa, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat terlihat dari uji t yang memiliki nilai t hitung (3,324) yang lebih besar daripada t tabel (2,001) dan/atau nilai signifikansi yang dibawah 0,05 (0,002). Pengaruh yang terjadi adalah positif atau jika tingkat pengalaman pemeriksa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat pendeteksian kecurangan laporan keuangan. (5) Pada penelitian ini, variabel objektivitas memiliki berpengaruh dominan terhadap pendeteksian kecurangan daripada variabel independensi dan pengalaman pemeriksa. Karena objektivitas memiliki nilai beta yang lebih besar daripada variabel lain dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05.

Saran

Jika ditinjau dari hasil uji hipotesis, keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan tujuan penembangan bagi penelitian selanjutnya, dapat memunculkan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan, dan saran tersebut antara lain: (1) Agar independensi dapat meningkatkan pendeteksian kecurangan secara maksimal, maka pada saat seorang pemeriksa melakukan tugasnya perlu melakukan pencegahan tindakan intervensi dari berbagai pihak demi menjaga kredibilitas organisasi BPK. (2) Agar objektivitas dapat meningkatkan pendeteksian kecurangan secara maksimal, maka pada saat seorang pemeriksa melakukan tugasnya sebaiknya tidak membiarkan adanya faktor salah saji dalam laporan yang diperiksa. Pemeriksa juga dalam pengambilan keputusan harus menggunakan pikiran yang logis sehingga dapat memberikan pendapat apa adanya sesuai fakta atau kondisi sebenarnya. (3) Agar pengalaman pemeriksa dapat meningkatkan pendeteksian kecurangan secara maksimal, maka BPK dapat melakukan hubungan dengan organisasi internasional lain atau lembaga pemeriksa negara lain. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga BPK. Pengalaman yang diperoleh dari kegiatan internasional ini bisa didapatkan dengan seminar, kongres, pelatihan, atau kelompok kerja di tingkat internasional. (4) Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan selalu memegang teguh nilai-nilai Independensi, Integritas, dan Profesionalisme yang tercantum di dalam SPKN 2017 dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya. (5) Jika ditinjau dari keterbatasan penelitian, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lain seperti metode kuantitatif dan menggunakan sampel yang lebih banyak guna lebih memperkuat hasil penelitian. (6) Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan. (7) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar tidak menyebarkan kuesioner pada saat pemeriksa sedang sibuk melakukan kegiatan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Arens, A.A., S.B. Mark, R.J. Elder. 2015. *Auditing & Jasa Assurance, Pendekatan Terintegrasi*. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Aulia, M.Y., 2013. Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis 2016-2020*. BPK. Jakarta.
- Deli, L., A. Fatma, dan F. Syarif. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Moderating Variabel. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15(1): 1-17.
- Fahmi, I. 2013. *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*. Cetakan Kesatu. Alfabeta. Bandung.
- Gita, N.P., 2013. Pengaruh Kompetensi dan Objektivitas Auditor Internal terhadap Keefektifan Fungsi Audit Internal. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasanah, S.. 2010. Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hilmi, F.. 2011. Pengaruh Pengalaman, Pelatihan dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Kode Etik Akuntan Profesional*. Grha Akuntan. Jakarta.
- Indiriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Cetakan Keenam. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jusup, Al. H. 2014. *Auditing Pengauditasi Berbasis ISA*. Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Kayo, A.S. 2013. *Audit Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Messier, W.F., S.M. Glover, dan D.F. Prawitt. 2014. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis*. Edisi Kedelapan. Salemba Empat. Jakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akutansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Refika Aditama. Bandung.
- Nasution, H., dan Fitriany. 2012. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, dan Tipe Kepribadian terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Cetakan Kedelapan. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pangestika, W., T. Taufik, dan A. Silfi. 2014. Pengaruh Keahlian Profesional, Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Jom Vekom* 1(2): 1-15.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. 6 Januari 2017. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

- _____. Nomor 2 Tahun 2011 Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. 7 Oktober 2011. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Rahayu, T. 2016. Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(4): 1-16.
- Samsi, N. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dengan Kepatuhan Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 1(12): 1-18.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kedua. CV. Alfabeta. Bandung
- Sukriah, I.A., dan B.A. Inapty. 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.
- Tuanakotta, T.M. 2014. *Audit Berbasis ISA*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2016. *Audit Kontemporer*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen keempat. 10 Agustus 2002. Jakarta.
- Widiyastuti, M. dan S. Pamudji. 2009. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*). *Value Added* 5(2): 52-73.